BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UMKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah (Departemen Koperasi, 2008).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini karena UMKM dapat menciptakan lapangan kerja terbanyak hingga mampu memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat bahkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun berikutnya. Dapat dikatakan bahwa UMKM mudah beradaptasi pada kondisi pasang surut suatu perekonomian dan arah permintaan pasar. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana, UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi

penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto. Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan bertumpu pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk itu pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan perekonomian nasional.

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) juga berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Suatu usaha bisa di katakan berkembang baik jika proses usahanya berjalan dengan lancar dengan memaksimalkan pekerja dalam suatu produktifitas yang di jalaninya. Selain itu usaha kecil menengah juga perlu adanya strategi agar dapat mencapai suatu sasaran sehingga dengan itu semua akan terkontrol dengan baik. Dengan menggunakan strategi maka suatu Badan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) akan dapat berkembang sesuai dengan harapan. Pengembangan organisasi adalah usaha terencana dikaitkan dengan peningkatan kreatifitas, ketrampilan, menyelesaikan masalah, pembelajaran dan perkembangan manusia dalam organisasi. Selain itu juga dapat mengubah tujuan dan strategi, tekhnologi, desain jabatan, struktur, proses dan orang - orangnya

Salah satu peluang UMKM yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia adalah usaha kuliner. Usaha kuliner merupakan bisnis yang tergolong tidak mudah dikarenakan membutuhkan banyak inovasi dan kreativitas dalam

pengembangannya sehingga dibutuhkan strategi yang tepat. Strategi tersebut berperan penting dalam keberlanjutan dari UKM kuliner. Semakin maju perkembangan jaman dan perubahan pola hidup manusia menyebabkan kebutuhan manusia juga berubah terutama dalam kebutuhan primer yang salah satunya adalah makanan dan minuman. Disisi lain jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahun terus meningkat juga menyebabkan kebutuhan masyarakat c Indonesia terhadap pangan semakin meningkat pula. Semakin meningkatnya kebutuhan pangan tersebut tentunya akan mendatangkan peluang-peluang bisnis yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan usaha makanan dan minuman yang pesat dapat dilihat dari banyaknya pemanfaatan usaha tersebut dalam penyediaan makanan dan minuman siap jadi.

Pelaku sektor UMKM kuliner harus mengembangkan dan meningkatkan inovasi penyajian makanan dan minuman dengan terlebih dahulu memahami tuntutan masyarakat yang berbeda dan kemudian mengembangkan item baru. Para pelaku sektor ini juga harus memiliki kemampuan manajemen keuangan, pemasaran, dan lainnya. Dalam upaya melestarikan budaya kuliner Indonesia dari generasi sekarang ke generasi selanjutnya dan memberi informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yg tinggal di daerah agar lebih berkembang mengenai budaya dan jenis – jenis kuliner Indonesia maka dirasa perlu adanya fasilitas – fasilitas yang menunjang seperti restoran, kursus untuk memasak dan tempat untuk membeli bumbu – bumbu dan sesuatu yang berhubungan dengan kuliner Indonesia

Pada Daerah Provinsi Maluku Utara, UMKM merupakan kelompok ekonomi terbesar dalam perekonomian Maluku Utara. Dari hasil Sensus Ekonomi (SE) 2016-lanjutan dalam Badan Pusat Statistik (2019), jumlah usaha ini

mencapai 98,84 persen dari total usaha non pertanian di Maluku Utara. Usaha ini menjadi pilihan sebagian besar masyarakat karena tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Provinsi Maluku Utara memiliki sektor basis pada sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor ini menjadi basis wilayah dikarenakan pangsa relatif pembentukan pendapatan secara sektoral lebih besar dibandingkan pangsanya secara nasional.

Di Maluku Utara ada banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya bagian kuliner, fashion, dan olahan rempah yang ada di Maluku Utara. Dengan kondisi tersebut dalam upaya untuk menciptakan dan atau mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada suatu daerah terkhususnya Provinsi Maluku Utara dipandang perlu adanya pemetaan Kawasan Sentra Produksi guna untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang dibentuk dalam suatu kawasan sebagai Sentra Pengembangan Produksi berskala kecil (mikro) dan ekonomis. Ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di suatu wilayah serta pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.

Berdasarkan data BPS tahun 2019 memperlihatkan gambaran sebaran UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, menyebutkan bahwa jumlah UMKM yang terdistribusi pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara terbanyak berada pada Kota Ternate sebanyak 24 persen dan yang paling terendah berada pada pulau taliabu sebesar 3 persen (BPS,2019). Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Distribusi UMK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara (Persen) Tahun 2019

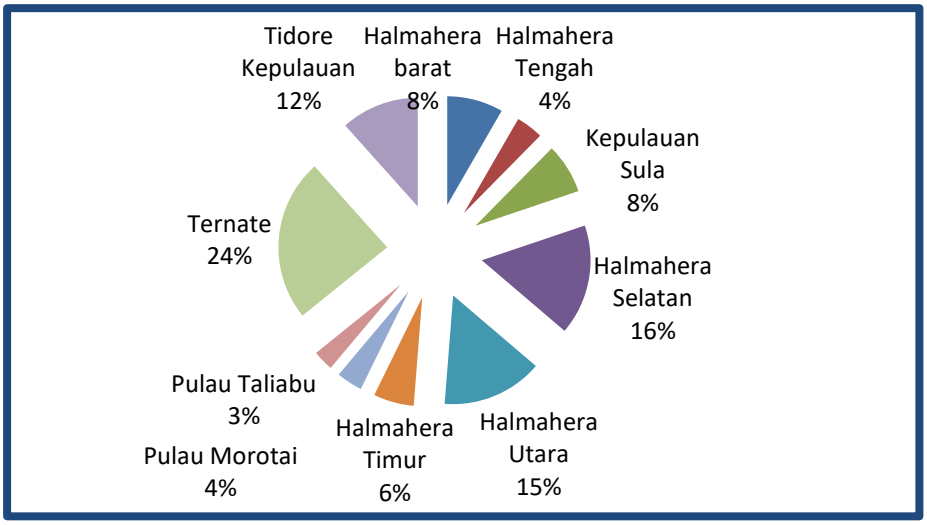

Sumber : BPS, 2019

Pengembangan UMKM di Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan pemetaan kawasan sentra produksi, setelah melalui tahapan pengumpulan data dan analisis maka telah teridentifikasi potensi dan sentra usaha mikro kecil dan menengah di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Sentra produksi unggulan merupakan satu kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur, serta kelembagaan dan sumberdaya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi di bawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing. Sejumlah lapangan usaha sudah mencatatkan pertumbuhan positif, dan beberapa bahkan terakselerasi dibandingkan sebelumnya, serta lebih lanjut mampu memberi kontribusi yang signifikan pada tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2020, serta menahan deselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luas wilayah adalah 40.263,72 Km2, terdiri dari luas lautan 31.484,40 Km2 (78%) dan luas daratan 8.779, 32 Km2 (22%), dan secara administratif terdiri dari 30 kecamatan dan 249 desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Selatan berada di Pulau Obi, Pulau Bacan, dan Bagian Selatan Pulau Halmahera. Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 371 pulau dan diantara pulau-pulau tersebut hanya 41 pulau yang berpenghuni. Sebagian besar masyarakat Halmahera Selatan berdiam di wilayah pantai/pesisir yakni sebanyak 95%, sedangkan 5% sisanya berdiam di daerah pedalaman. Dalam hal kondisi geografis ini Kabupaten Halmahera Selatan untuk pembangunan perekonomian daerah UMKM menjadi sektor usaha yang diandalkan oleh masyarakat karena memiliki peran sangat penting terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja. Pendapat ini didasarkan pada berbagai kenyataan dan fenomena yang menunjukan bahwa kelompok usaha ini mempekerjakan lebih banyak orang dibandingkan unit-unit usaha lain. Mereka diharapkan bisa tetap menciptakan dan mengembangkan usaha sampai pada skala optimalnya sehingga mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja baru dengan berbagai cara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar kekuatan Ekonomi Rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan Ekonomi, serta mewujudkan stabilitas daerah dan nasional. Mengingat arti penting Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional dalam hal ini untuk kontribusi pemerintah Daerah Kabupaten halmahera selatan dalam pengembangan UMKM yaitu dengan lebih memberikan kemudahan, dukungan, pelindungan, dan pemberdayaan dari

pemerintah daerah. Keperpihakan Pemerintah Daerah kepada UMKM ditunjukan dengan di keluarkannya Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Peraturan Bupati ini diatur antara lain mengenai kemudahan perizinan bagi UMKM, pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk kemudahan perizinan berusaha, pendampingan bagi UKM yang telah mendapatkan nomor induk berusaha serta perlindungan UKM dalam hal pemberian bantuan dan pendampingan hukum serta pemulihan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan dengan penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik, pengadaan barang/jasa pemerintah, pengendalian kemudahan berusaha, perlindungan, serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu kemitraan dan insentif memberikan kemudahan dalam pemberian pembiayaan bagi UMKM. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan dengan memberi kemudahan UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha. Pendampingan kepada pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk pengembangan usahanya dan mengupayakan akses pasar yang lebih luas atas produk–produk UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan. Berikut ini data perkembangan UMKM Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020.

Gambar . 1. 2
Data UMKM Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2020

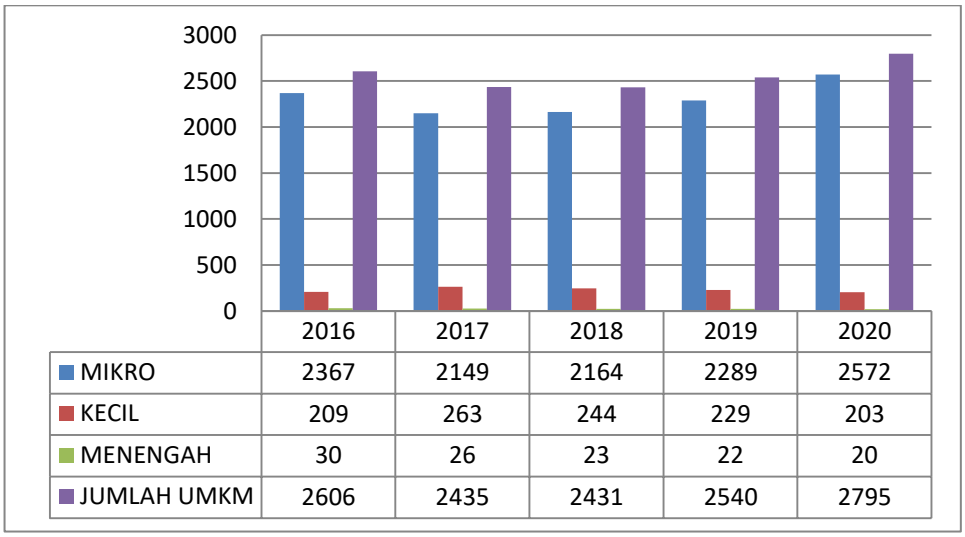

	2016	2017	2018	2019	2020
MIKRO	2367	2149	2164	2289	2572
KECIL	209	263	244	229	203
MENENGAH	30	26	23	22	20
JUMLAH UMKM	2606	2435	2431	2540	2795

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Halmahera Selatan

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Halmahera Se[latan terjadi peningkatkan jumlah UMKM dalam lima tahun terakhir. Tahun 2016 ke tahun 2020 Usaha Mikro mengalami kenaikan sebesar 205 unit bisnis, namun untuk Usaha Kecil mengalami penurunan sebesar 6 unit bisnis, sedangkan Usaha Menengah mengalami penurunan juga dengan 10 unit bisnis. Sejalan dengan hal ini perkembangan jumlah UMKM secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2016 jumlah UMKM sebesar 2606 unit dan pada tahun 2020 sebesar 2795 unit. Dari jumlah unit tersebut sektor UMKM yang mendominasi di Kabupaten Halmahera Selatan adalah sektor perdagangan sejumlah 1460 unit usaha diantaranya usaha sembako dan usaha bahan bangunan, kuliner sejumlah 664 diantaranya usaha rumah makan dan industri pengolahan, sektor budidaya pertanian dengan jumlah 121 unit usaha kopra, kakao, vanili, cengkeh, pala, kenari, lalu diikuti dengan sektor lainnya yaitu fashion sebesar 73 unit usaha, otomotif 66 usaha, lalu

industry kecil 873 usaha dan yang paling kecil yaitu bidang pendidikan hanya 3 unit usaha berdasarkan dari data di atas mengindikasi bahwa perkembangan UMKM belum sepenuhnya didukung oleh pemanfaatan sumber daya lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Hamid dan Susilo (2011) Dalam hal perbedaan masalah yang dihadapi tergantung dari jenis dan karakteristik industri kecil. Ada yang menyatakan masalah pokok yang dihadapi adalah kemampuan bersaing di pasar, pemasaran produk, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Dalam hal dinamika usaha, persamaan di antara mereka terutama dalam diversifikasi produk. Sejalan dengan data jenis industri tersebut data usaha mikro kecil menengah diklasifikasikan lagi dengan penyebaran jumlah UMKM per Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan terlihat Pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM Per Kecamatan
Kabupaten Halmahera Selatan

NO	Kecamatan	Jumlah UMKM(unit)	NO	Kecamatan	Jumlah UMKM(unit)
1	Bacan	1099	16	Kayoa	26
2	Bacan Selatan	731	17	Kayoa Barat	17
3	Bacan Timur	200	18	Kayoa Utara	10
4	Bacan Timur Tengah	51	19	Kayoa Selatan	10
5	Bacan Timur Selatan	64	20	Gane Barat	36
6	Bacan Barat	17	21	Gane Barat Utara	18
7	Bacan Barat Utara	12	22	Gane Barat Selatan	17
8	Botang Lomang	43	23	Gane Timur	35
9	Mandioli Utara	27	24	Gane Timur Tengah	17
10	Mandioli Selatan	45	25	Gane Timur Selatan	7
11	Kasiruta timur	5	26	Obi Utara	18
12	Kasirut barat	35	27	Obi Barat	5
13	Kepulauan Joronga	19	28	Obi	154
14	Pulau Makian	13	29	Obi Timur	9
15	Makian Barat	19	30	Obi Selatan	36
Total = 2795 unit usaha industri mikro kecil dan menengah					

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Selatan Tahun 2020

Tabel tersebut diatas menunjukan bahwa jumlah UMKM per Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan terbanyak pada Kecamatan Bacan sebanyak 1099 unit merupakan wilayah yang paling tumbuh dalam UMKM, diikuti Kecamatan Bacan Selatan berjumlah 731 unit UMKM, obi 154, dan Bacan Timur Tengah 51 unit. Sedangkan wilayah yang keberadaan UMKM sangat kurang adalah Kecamatan Kasiruta Timur, Obi Timur, Obi Barat, Kayoa Utara, Kayoa Selatan, dan Gane Timur Selatan. Meskipun Kabupaten Halmahera Selatan memiliki beberapa usaha berskala UMKM dan tersebar pada setiap wilayah kecamatan, kabupaten ini mengunggulkan berbagai macam produk UMKM berbasis industri yang memiliki sentra produksi pada beberapa kecamatan dan desa. Sentra-sentra produksi yang tumbuh antara lain sentra produksi gula aren, sentra produksi pengolahan ikan (kerupuk ikan/kamplang, abon ikan, ikan asap, ikan asin, dan babyfish kering), sentra produksi sagu singkong, kerajinan anyaman, pengolahan kelapa, dan sentra produksi sagu rumbia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Industri Kuliner Daerah Kabupaten Halmahera Selatan?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengembangan UMKM Industri Kuliner di Kabupaten Halmahera Selatan?
3. Bagaimana Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pengembangan UMKM Industri Kuliner di Kabupaten Halmahera Selatan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Bagaimana Strategi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Industri Kuliner di Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Mengetahui Bagaimana Faktor-Faktor Penghambat Dalam pengembangan UMKM industri kuliner di Kabupaten Halmahera Selatan?
3. Bagaimana Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pengembangan UMKM Industri Kuliner di Kabupaten Halmahera Selatan?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan pengetahuan tentang apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan usaha industri kuliner serta mengetahui mengenai bagaimana strategi pengembangan UMKM untuk industri kuliner Di Kabupaten Halmahera Selatan, dan semoga Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau rekomendasi untuk pengambilan kebijakan mengenai para pelaku UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan terutama kebijakan untuk mengembangkan UMKM itu sendiri. Dan juga semoga Bagi peneliti lain dan akademik, sebagai tambahan informasi dan disiplin ilmu, menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama,